

ABSTRAKSI

Bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan program baru yang digulirkan oleh kementerian sosial pada tahun 2016 di Kecamatan Jaten. Program ini merupakan kelanjutan dari program bantuan sosial Kube PKH yang sudah banyak memandirikan masyarakat penerima bantuan sejak digulirkan pada tahun 2013 di Kecamatan Jaten. Kementerian Sosial selaku stakeholder utama menggulirkan program ini dalam upaya untuk memandirikan desa dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pengguliran bantuan ini di Kecamatan Jaten ternyata tidak dilepaskan adanya pengaruh *pseudo government* yang mempengaruhi ke-optimalan pelaksanaan pemberdayaan Kube PKH untuk membentuk DSM di Kecamatan Jaten. Akan tetapi, pada proses pelaksanaan ada perlawanan kolektif yang dilakukan oleh para stakeholder program di Kecamatan Jaten agar program ini tetap berjalan walaupun tekanan praktik *pseudo government* yang dilakukan oleh elite penguasa terus berjalan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena *pseudo government* yang terjadi pada pengguliran bantuan sosial Kube PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten. Praktik *pseudo government* terjadi diberbagai tingkatan stakeholder, untuk bisa menguasai bantuan sosial yang digulirkan oleh stakeholder utama untuk kepentingan politiknya. Disamping itu praktik *pseudo government* yang terjadi di Kecamatan Jaten pada pengguliran bansos ternyata menuai perlawanan oleh aktor-aktor yang berada di stakeholder utama dan kunci. Untuk bisa mendiskripsikan dan menganalisisnya maka peneliti meminjam teori konsep sosiologi yang ditawarkan Bourdieu yaitu arena (*field*), habitus, dan kapital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi focus group discussion (FGD), dan studi dokumen. Data kemudian dideskripsikan, didialogkan dengan teori, dan interpretasikan. Proses tersebut berjalan secara siklus interaktif.

Temuan pada penelitian bahwa praktik *pseudo government* yang terjadi di Kecamatan Jaten membawa pengaruh pada tujuan kemandirian dari Kube maupun Desa tidak terlaksana secara maksimal. Proses tersebut juga membawa pengaruh pula terhadap praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping Kube, dimana mereka kesulitan untuk mengatur anggota Kube untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lembaganya. Akibatnya kemandirian dari Kube tersebut sulit diwujudkan. Walaupun demikian, Kube yang berada di Kecamatan Jaten tidak semua patuh dengan *pseudo government*. Mereka ada yang melakukan perlawanan secara kolektif dengan memperkuat modal-modal yang dimilikinya. Perlawanan ini merupakan proses heterodoxa yang bertujuan untuk menciptakan keberhasilan program yaitu memandirikan Kube dan Desa penerima bantuan. Pola perlawanan kolektif yang dilakukan Kube didukung oleh stakeholder utama dengan memberikan penguatan modal-modal yang dimiliki dalam melaksanakan pemberdayaan kube untuk mengembangkan menjadi DSM.

Kata Kunci: Pseudo Government, Arena Sosial, Modal, Habitus, Pemberdayaan, Usaha Ekonomi Produktif, Desa Sejahtera Mandiri

ABSTRACTION

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sejahtera Mandiri (DSM) is a new program launched by the social ministry in 2016 in Jaten Sub-district. This program is a continuation of KUBE PKH social assistance program which has been a lot of supporter community since it was launched in 2013 in Jaten Subdistrict. Ministry of Social Affairs as the main stakeholders to roll out this program in an effort to establish village in overcoming social welfare problems. The scattering of aid in Jaten sub-district was not released by the influence of pseudo government which influenced the optimum implementation of Kube PKH empowerment to form DSM in Jaten Sub-district. However, in the implementation process there is a collective resistance committed by stakeholders of the program in Kecamatan Jaten to keep this program running despite the pressure of pseudo-government practices undertaken by the ruling elite. This research intends to examine the phenomenon of pseudo government which happened in Kube PKH development scheme of DSM development in Jaten Subdistrict. The practice of pseudo-government takes place at various levels of stakeholders, in order to master the social assistance that the main stakeholders have for their political interests. Besides, the practice of pseudo government that occurred in Jaten Subdistrict on bansos scattering was reaping resistance by the actors who were in the main stakeholder and key. To be able to describe and analyze it then researchers borrow sociology concept theory that offered Bourdieu arena (field), habitus, and capital. This research uses qualitative method with phenomenology approach. To collect data, researchers used in-depth interview techniques, focus group discussion (FGD) observations, and document studies. The data are then described, dialogued with theory, and interpreted. The process runs in an interactive cycle.

The findings in the study that the practice of pseudo government that occurred in the District Jaten bring influence on the goal of independence from Kube and Village is not implemented maximally. The process also has an effect on the empowerment practices undertaken by the Kube companions, where they find it difficult to organize Kube members to develop their economic, social, and institutional aspects. As a result of independence from the Kube is difficult to be realized. Nevertheless, the Kube located in Jaten District is not all obedient to pseudo government. There are those who fight collectively by strengthening the capital-capital owned. This resistance is a heterodoxa process that aims to create a successful program that is to create Kube and Village beneficiaries. Kube's collective resistance pattern is supported by key stakeholders by providing capital strengths in implementing the kube empowerment to develop into DSM.

Keywords: Pseudo Government, Social Arena, Capital, Habitus, Empowerment, Kelompok Usaha Bersama, Desa Sejahtera Mandiri